

**RELASI ANTAR KELEMBAGAAN DESA DALAM PEMBANGUNAN
INSFRATUKTUR DI DESA MAYANG PONGKAI KECAMATAN KAMPAR KIRI
TENGAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2016**

Ravi Santoso

Email : Ravisantoso04@gmail.com

Pembimbing : Drs. Erman M, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

In the administration of village governance, in Indonesia it is often experienced problems that arise related to the relationship. As well as coordination between village head and village institution in Mayang Pongkai village Kampar Kiri district Kampar regency. So far the coordination between the village head and the Village Institution is well established but there are some issues that are problematic in the coordination between the village head and the Village Institution in the village such as the problems that have occurred in Mayang Pongkai village. Where the Village Institution has little active role in carrying out its duties and functions, the Village Institution is only an approved institution. Never even supervise the village apparatus, this leads to the inconsistency between the Village Institution and the Village Head.

Problems related to the synchronous partnership system established between the village head and the Village Institution in order to establish a good and prosperous working relationship it is necessary to find the right relationship partnership model for it in this study conducted in-depth research in the village of Mayang Pongkai Kampat Kiri Kampar Kiri regency.

Development in the village mayang pongkai still far behind in the appeal of villages in the middle campar district. Development planning made by the village government apparatus has not been able to answer the aspirations of the community and not synergize with the vision of the village mission.

The purpose of this research is to know the relation of existing village institution in Mayang Pongkai Village in construction of insfratuktur in the village.

The concept of theory that researchers use is Relation and development This research uses a qualitative approach with descriptive method. In data collection, researchers used interview techniques, documentation and observation.

The result of this research is the relation of village institution in Mayang Pongkai village has not run well, it is influenced by several things such as lack of membership, lack of participation of society and especially bad relationship between institutions in Mayang Pongkai Village.

Keywords: relation, village institution

Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Sedangkan pada pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Perangkat desa terdiri atas : sekretaris desa, pelaksanaan kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat desa berudukan sebagai unsur pembantu kepala desa. Sekretaris desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh staf sekretariat.

Negara republik indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Berdasarkan undnag – undang nomor 23 tahun 2014 maka dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat 2 unsur pemerintahan penting yang berperan didalamnya, yaitu pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

Pemerintah desa merupakan lembaga eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga legislatif desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, perangkat desa bertugas membantu kinerja kepala desa dalam

melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah desa. Bersama perangkat desa, kepala desa sebagai pimpinan struktur pemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari koordinasi yang baik antar aparatur desa. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Badan permusyawaratan desa adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala desa. BPD berkedudukan sejajar menjadi mitra pemerintah desa. Koordinasi antara kepala desa dan badan perwakilan desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan sub koordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua setingkat dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama, dan saling menghargai.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, di Indonesia memang seringkali mengalami persoalan persoalan yang timbul terkait dengan hubungan tersebut. Seperti halnya koordinasi antara kepala desa dengan BPD di desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Sejauh ini koordinasi antara kepala desa dan Kelembagaan Desa terjalin cukup baik namun ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam koordinasi antara kepala desa dan Kelembagaan Desa di desa tersebut seperti permasalahan yang pernah terjadi di desa Mayang Pongkai. Dimana Kelembagaan Desa kurang berperan aktif menjalankan tugas dan fungsinya, Kelembagaan Desa hanya berupa lembaga

yang menyetujui. Bahkan tidak pernah melakukan pengawasan terhadap aparat desa hal ini menimbulkan ketidaksinkronan antara Kelembagaan Desa dengan Kepala desa.

Terdapat beberapa faktor lagi yang menyebabkan Kelembagaan Desa dan kepala desa terjebak dalam perbedaan dan pertentangan yang mengarah pada terjadinya konflik, diantaranya adanya sikap dan perilaku khususnya kepala desa yang masih ingin mempertahankan kekuasaan, terbatasnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya komunikasi dan koordinasi, keterbatasan anggaran operasional Kelembagaan Desa, rendahnya partisipasi masyarakat, kendala yuridis dan politis.

Persoalan terkait dengan sistem kemitraan yang sinkron yang dibangun antara kepala desa dan Kelembagaan Desa agar terselenggara hubungan kerja yang baik dan sejahtera maka perlu dicarikan model kemitraan hubungan yang tepat untuk itu dalam kajian ini dilakukan penelitian yang mendalam di desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Pembangunan di Desa mayang pongkai masih jauh tertinggal di banding desa-desa yang ada di kecamatan kampar kiri tengah. Perencanaan pembangunan yang dibuat oleh aparat pemerintah desa belum bisa menjawab aspirasi masyarakat serta tidak bersinergi dengan visi misi desa.

Tabel 1.1

Pembangunan yang ada di Desa Mayang Pongkai tahun 2016

N o	Jenis Bangunan	Sumber Dana	Progres
1	Kantor Kepala Desa	APBD	85%
2	Jembatan	APBD	75%

3	Jalan beraspal	APBD	60%
4	Pembangunan Drainase	APBD	40%
5	Rehab ringan loteng kantor Desa	ADD	70%
6	Pembangunan gedung UED SP	APBD	20%
7	Pembangunan poskamling di tiap dusun	ADD	40%

Sumber : Kantor Desa Mayang Pongkai

Dilihat dari tabel diatas inilah gambaran umum kerusakan yang terjadi di desa mayang pongkai, yang sangat perlu diperbaiki dari pemerintah daerah adalah perbaikan jalan, yang dijalan ini adalah sebagai jantung didalam perekonomian masyarakat. Desa mayang pongkai termasuk desa Swadaya. Adapun ciri-ciri desa swadaya menurut Drs. Bayu Surianingrat (1985:163) adalah:

Kepadatan penduduk rendah, artinya bahwa penduduk desa dibandingkan dengan luas desa, adalah jarang.

Hubungan dengan kota misalnya ibu kota kabupaten jauh.

Mata pencaharian homogen yang beraifat agraris, Bersifat tertutup. Masyarakat memegang teguh adat. Sarana dan prasarana sangat kurang. Teknologi yang masih rendah. Hubungan antar manusia sangat erat. Tingkat pendidikan masih rendah.

Dari beberapa masalah diatas peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan perencanaan

pembangunan di Desa mayang pongkai belum terlaksana dengan baik terbukti dengan rendahnya tingkat pembangunan. Dari beberapa masalah diatas peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa mayang pongkai belum terlaksana dengan baik terbukti dengan rendahnya tingkat pembangunan. Kemudian ditambah lagi dengan permasalahan antar kelembagaan desa baik itu Kepala Desa, BPD, LKMD, Karang Taruna, PKK, serta kelembagaan desa yang ada di Desa Mayang Pongkai.

Berdasarkan uraian – uraian diatas penulis mengangkat permasalahan ini yang berjudul **“RELASI ANTAR KELEMBAGAAN DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA MAYANG PONGKAI KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR 2016”**

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan, maka penulis merumuskan masalah, yaitu :

1. Bagaimana Relasi antara Kepala Desa dan kelembagaan Desa di Desa mayang pongkai?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Relasi tidak berjalan dengan baik, sehingga pembangunan Desa terhambat?

Kerangka Teoritis

1. Relasi

Relasi menurut George Hillery jr(2002:67) relasi adalah sekelompok orang yang tinggal didaerah tertentu yang memiliki hubungan interaksi satu sama lain yang menjadikan kelompok itu saling mengenal satu sama lain dalam sebuah lingkungan kelompok manusia tersebut.

Menurut Drs. Abdul Chear(2008:48) mengemukakan bahwa Relasi merupakan hubungan kemaknaan, antara organisasi dengan komunitas terdapat hubungan saling ketergantungan sehingga memotivasi organisasi untuk melakukan hubungan yang saling menguntungkan.

Menurut Astuti,(2012:98) Relasi juga disebut hubungan sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaiannya) tingkah laku yang sistematis antara dua orang atau lebih. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa relasi merupakan hubungan timbal balik antar organisasi dengan individu yang lain atau masyarakat lain dan saling mempengaruhi. Sikap publik terhadap suatu organisasi dimasa depan juga amat bergantung bagaimana informasi yang diperoleh mengenai organisasi, ataupun bagaimana publik menyampaikan apa yang dirasakan mengenai organisasi.

Menurut IG Wasanto, tujuan dari Relasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan saling pengertian antar pegawai ataupun antara pimpinan dengan semua pegawai dalam sebuah organisasi.
2. Mendapatkan data-data yang lengkap tentang sikap dan tingkah laku pegawai. Data ini diperlukan dalam rangka pembinaan pengorganisasian, kerja sama, koordinasi dan evaluasi terhadap pegawai .
3. Menciptakan kerja sama yang serasi antara pegawai.
4. Menanamkan rasa damai kepada pegawai
5. Menanamkan rasa sukses pada seluruh pegawai sehingga mereka merasa diberi kesempatan untuk maju dalam mengembangkan kariernya.
6. Menanamkan loyalitas.

7. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada para anggota.

8. Menciptakan adanya semangat kerja yang tinggi.

Menurut Spradley dan McCurdy, relasi atau hubungan yang terjalin antara individu yang berlangsung dalam waktu yang relatif lama akan membentuk suatu pola, pola hubungan ini juga disebut sebagai pola relasi sosial.

Manusia ditakdirkan sebagai makhluk pribadi, manusia berusaha mencukupi semua kebutuhannya untuk kelangsungan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak mampu berusaha sendiri, mereka membutuhkan orang lain. Itulah sebabnya manusia perlu berelasi atau berhubungan dengan orang lain sebagai makhluk sosial.

2. Pembangunan

Pembangunan merupakan salah satu alternatif untuk mewujudkan amanat dan cita-cita bangsa, begitu juga dengan pembangunan desa. Pemerintah selaku aparat yang bertugas melayani kepentingan masyarakat memiliki tanggung jawab penuh untuk melaksanakan program pembangunan demi kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Talizi (2005:48) menyatakan bahwa hakekatnya keberhasilan pembangunan desa ditentukan oleh empat hal yang penting, yaitu :

- a. Adanya keikutsertaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha meningkatkan taraf hidup mereka.
- b. Sumber-sumber pendapatan desa.
- c. Fungsi lembaga desa dan keterlibatan perangkat desa.

Menurut penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa pembangunan desa merupakan upaya pembangunan yang dilakukan di desa dengan melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, serta disusun berdasarkan perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa dapat dikatakan berhasil apabila seluruh usaha-usaha yang dilakukan didalam lingkungan desa dengan tujuan untuk mendapatkan taraf hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana.

Sedangkan menurut Riant Nugroho (2006:10) pembangunan secara sederhana dapat di artikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami, baik dari segi definisi ekonomi, sosial politik, atau hukum.

Lebih jauh mengatakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan antara lain:

- a. Terciptanya kordinasi, integritas, dan sinkronisasi antara sektor ruang dan waktu sesuai kebutuhan masyarakat.
- b. Menjamin konsistensi perencanaan pembangunan yang disepakati
- c. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan dan keterlibatan penyelenggaraan dari masyarakat.
- d. Menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan secara efisiensi dan efektif.

Pengertian pembangunan menjadi hal yang paling menarik untuk di perdebatkan. Mungkin tidak ada suatu disiplin ilmu

yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran yang telah berkembang, mulai dari perspektif klasik (Durkheim, Weber dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga perkembangan lanjutan.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberi definisi yang bermacam macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan oleh salah satu orang dengan orang lain, daerah satu dengan daerah yang lainnya, negara satu dengan negara lainnya. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan suatu proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusuma, 2005).

Pembangunan merupakan suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung terus menerus menuju ke arah perkembangan dan kemajuan dan memerlukan masukan masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha usaha yang dilajykan pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara (Haryono Sudriamunawar, 2002:17).

Menurut Mustopodjaya AR (1998:115) proses pembangunan ditentukan oleh sistem pemerintahan yang dianut dan dipengaruhi oleh berbagai faktor :

- a. Ideologi dan pembangunan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan.
- b. Kebudayaan dan kebiasaan hidup didalam masyarakat yang bersangkutan.
- c. Tingkat kemajuan sosial ekonomi yang telah dicapai bangsa tersebut

berdasarkan beberapa uraian diatas bahwa untuk dapat melaksanakan berbagai program untuk dapat meningkatkan pembangunan di desa mayang pongkai

perlu ada sistem administrasi pembangunan.

Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Adapun kebutuhan manusia terbagi kedalam lima tingkatan, yaitu: fisikologis, keamanan, rasa memiliki, penghargaan. Pembangunan mempunyai arti yang luas. Tergantung pada sisi mana konteks apa serta belakangnya pengalaman dari pencetusnya. Oleh karena itu pembangunan diartikan suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan lebih baik berdasarkan pada norma norma tertentu, perencanaan, pembangunan potensi alam, manusia dan sosial budaya (Haryono Sudriamunawar, 2002:15)

Pembangunan di definisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju pembinaan bangsa. (Sondang P, Siagian, 2001:4)

Dari definisi pembangunan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

- a. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap tahap yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari suatu yang bersifat tanpa akhir.
- b. Pembangunan dilakukab secara terencana. Baru dalam arti jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek.
- c. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.
- d. Pembangunan mengarah pada modernitas.

Agar pembangunan dapat berhasil, maka diperlukab dukungan perhatian dan partisipasi dari masyarakat pedesaan, dan pembangunan di daerah pedesaan merupakan pembangunan yang langsung smenyentuh kepentingan masyarakat indonesia yang bermukim di daerah pedesaan. Mekan dengan demikian merupakan pula mula titik sentral dari pada pembangunan nasional.

Dari pedesaan merupakan tumpuan dari segala segi kegiatan pembangunan. Oleh karna itu, peran pemerintah deaa, khususnya kepala desa sebagai kepala wilayah yang berada di wilayah desa itu. Dalam hal ini sangat menompang sekali untuk tercapainya pembangunan di suatu desa.

Desa adalah badan pemerintahan negara terindah yang terdekat dan langsung berhubungan dengan masyarakat. Kepala desa adalah administrator pembangunan, administrator pemerintahan, dan administrator kemasyarakatan kepala desa melaksanakan kordinasi dan control di wilayahnya, segala kegiatan kegiatan pembangunan yang ada di desa (Suryadiningrat, 1982:147)

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi, yaitu mengumpulkan data berdasarkan laporan-laporan dokumenter yang terkait dengan pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru terhadap fungsi terminal angkutan umum Bandar Raya Payung Sekaki

Sekaki Tahun 2016. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh dari lokasi penelitian, berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan selanjutnya didukung oleh data sekunder terkait dengan pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru terhadap fungsi terminal angkutan umum Bandar Raya Payung Sekaki Tahun 2016.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fenomena menunjukkan bahwa pemerintahan desa diperlukan sama seperti pemerintahan daerah, yang dimana artinya desa dikembalikan secara sentralistis oleh pemerintahan pusat. Dimana kondisi seperti itu menguat satu prinsip bahwa desa sebagai subsisten pemerintahan nasional. Untuk itu desa harus di kontrol secara baik .

Melalui kerangka dasar tersebut bahwa era reformasi memposisikan desa sebagai subsistem pemerintahan kabupaten yang secara prinsip menandakan pemerintah semakin dekat antara kekuasaan rakyat. Kondisi diatas memang telah memberi ruang untuk pemerintahan desa.

Pembangunan desa sejauh ini hanya dianggap sebagai objek pembangunan fenomena ini sangat kurang menguntungkan bagi lajunya pemerintahan bagi level pemerintahan desa.

Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar sebagai salah satu desa yang sedang melaksanakan pembangunan desa yang baik dalam menjalankan tatanan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan perekonomian di wilayahnya . Desa Mayang Pongkai ini merupakan desa yang berada dikawasan kecamatan kampar kiri tengah yang sedang berkembang dan diharapkan dapat mencapai hasil pembangunan dimasa yang akan datang dengan usaha yang efektif dalam mencapai tujuan.

Dalam hal membantu pembangunan di desa Mayang Pongkai ini kecamatan perlu menjadi mediasi terhadap pemerintahan desa dan lembaga desa yang ada di desa mayang pongkai.

Dalam hal ini juga penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dari informen. Wawancara ini dilakukan sesuai dengan jumlah sampel yang menjadi informen penelitian ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dapat dikumpulkan sejumlah data yang diperlukan, meliputi data untuk mengetahui apa-apa saja faktor penghambat dalam pembangunan di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar tahun 2016.

Hambatan Sumber Daya Aparatur Desa

Dalam pelaksanaan pembangunan sangat erat kaitannya dengan hasil dari perencanaan tersebut. Menurut Dedy Supriady Bratakakusuma dan Raharjo Adisasmita (2006:24) pada setiap aktifitas kegiatan baik yang dilaksanakan individu maupun kelompok, sumber daya manusia selalu menjadi faktor utama sebagai motor penggerak dan lemahnya perencanaan pembangunan sangat erat kaitannya dengan kerja sama antar lembaga yang menjadi harapan masyarakat di desa.

SDM Andrew F. Sikula dan John F. McKenna dalam *The Management of human resources* (1998) menjelaskan bahwa perencanaan SDM meliputi beberapa langkah yang terdapat di dalam Taliziduhu Ndruha (1999: 123-124) yaitu:

1. Menetapkan tujuan (objectives). Penetapan tujuan berarti meletakkan hubungan antara SDM masa depan dengan kebutuhan masa depan perusahaan.
2. Menyusun rencana organisasi. Pengembangan organisasi mempengaruhi perencanaan SDM suatu organisasi.

Mengaudit SDM yang ada. Auditing adalah penelitian sistematis guna mencari, menghimpun dan menganalisis data yang berkaitan dengan produksi, produk, lapangan kerja, kompetisi, SDM, keterampilan dan sebagainya yang ada dalam waktu jangka tertentu.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya tidak terlepas dari kepemimpinan kepala desa dan perangkatnya didalam menjalankan roda pemerintahan desa. Didalam pelaksanaan pembangunan desa tingkat hubungan kerja sama sangatlah erat kaitannya berhasil tidaknya dalam melaksanakan pembangunan. Demikian halnya dengan relasi lembaga desa yang ada di desa Mayang Pongkai.

Kelembagaan desa yang ada di desa Mayang Pongkai pada dasarnya memiliki peran dan tugas masing-masing namun hal ini tidak berjalan dengan baik. Dimana Kelembagaan Desa kurang berperan aktif menjalankan tugas dan fungsinya, Kelembagaan Desa hanya berupa lembaga yang menyetujui. Bahkan tidak pernah melakukan pengawasan terhadap aparat desa hal ini menimbulkan ketidaksinkronan antara Kelembagaan Desa dengan Kepala desa.

Terdapat beberapa faktor lagi yang menyebabkan Kelembagaan Desa dan kepala desa terjebak dalam perbedaan dan pertentangan yang mengarah pada terjadinya konflik, diantaranya adanya sikap dan perilaku khususnya kepala desa yang masih ingin mempertahankan kekuasaan, terbatasnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya komunikasi dan koordinasi, keterbatasan anggaran operasional Kelembagaan Desa, rendahnya partisipasi masyarakat, kendala yuridis dan politis.

Persoalan terkait dengan sistem kemitraan yang sinkron yang dibangun antara kepala desa dan Kelembagaan Desa agar

terselenggara hubungan kerja yang baik dan sejahtera maka perlu dicarikan model kemitraan hubungan yang tepat untuk itu dalam kajian ini dilakukan penelitian yang mendalam di desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar.

Pembangunan di Desa mayang pongkai masih jauh tertinggal di banding desa-desa yang ada di kecamatan kampar kiri tengah. Perencanaan pembangunan yang dibuat oleh aparat pemerintah desa belum bisa menjawab aspirasi masyarakat serta tidak bersinergi dengan visi misi desa.

Berdasarkan hasil dengan wawancara bapak kepala desa (Muhammad Yandri) , beliau mengatakan dalam kutipan wawancaranya tentang rendahnya tingkat relasi antar lembaga desa

“ Desa mayang pongkai ini merupakan desa yang sangat baik letaknya dimana hanya berjarak lebih kurang 4 km dari pusat kecamatan permasalahan lambatnya pembangunan yang ada didesa ini merupakan dampak dari buruknya relasi lembaga desa yang ada didesa Mayang Pongkai ,faktor inilah yang menjadi hambatan dalam pembangunan ini,terlepas dari belum maksimalnya relasi antar lembaga desa yang ada saya juga menyayangkan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat desa Mayang Pongkai yang acuh tak acuh pada pemerintahan desa.harapan saya untuk tahun kedepannya pemerintah desa,lembaga desa dan masyarakat desa mampu memaksimalkan dengan baik kesempatan dan program pembangunan yang sudah kita canangkan ini.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Kaur Pemerintahan (Sukwardi) mengatakan dalam kutipan wawancaranya tentang kurang terjalannya relasi antar kelembagaan desa mengatakan:

“Disini saya mengatakan sebenarnya struktur organisasi lembaga desa yang

kami miliki tidaklah terlalu buruk dalam pemerintahan ini. Hanya saja dalam orientasi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan ditingkat yang lebih baik lagi selalu terkendala.

Sejauh ini pihak aparat desa Mayang Pongkai memerlukan penyusunan struktur organisasi yang baik ,baik itu SDM didalam lembaga tersebut maupun penunjukan aparat-aparat desa yang baru yang diharapkan lebih mampu untuk berelasi bersama lembaga yang ada untuk mencapai satu tujuan yang telah di programkan.

Faktor Sumber Dana

Anggaran merupakan salah satu yang sangat penting didalam proses pelaksanaan pembangunan , dan juga menjadi tolak ukur kesuksesan sebuah program ataupun kebijakan pemerintah yang terkhususnya didalam membutuhkan anggaran demi mensukseskan program pelaksanaan tersebut. Faktor – Faktor sumber dana ini sangat signifikan dikarenakan apabila tidak ada anggaran. Maka program yang telah dilaksanakan tidak akan berjalan secara optimal. Bahkan program yang terkadang sedang berjalan dapat berhenti ditempat karna terhambatnya anggaran yang dikeluarkan untuk program tersebut.

Untuk tetap terjaganya faktor anggaran didalam suatu program pembangunan, maka seluruh pihak-pihak yang terkait didalam penyusunan anggaran harus dapat bekerja dengan baik untuk bisa nantinya dapat menyepakati sebuah anggaran dalam RAPBD dengan efektif dan efisien berdasarkan pengoptimalan program-program yang dapat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat secara umum. Maka pihak pihak terkait dalam hal ini adalah pemerintah desa dan lembaga desa yang ada.

APBDesa Mayang Pongkai dianggarkan untuk program pembangunan yang telah

direncanakan ditahun tahun sebelumnya, pada tahun ini pemerintah kembali menggesa pembangunan yang berkelanjutan terhadap desa Mayang Pongkai

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Program pembangunan Desa Mayang Pongkai ini pada prinsipnya direncanakan melalui musyawarah yang baik oleh pemerintah Desa Mayang Pongkai. Akan tetapi hasil musyawarah pembangunan yang dilakukan tidak berjalan dengan seharusnya, dimana masih sulit mendapatkan partisipasi masyarakat ditambah lagi dengan adanya hubungan yang tidak baik antara lembaga desa yang ada di Desa Mayang Pongkai ini. Hasilnya apa-apa yang sudah direncanakan tidak dapat berjalan, membuat rekomendasi yang diajukan mulai dari Musrenbang tingkat desa sulit untuk diperjuangkan ke Kecamatan hingga tingkat Kabupaten. Hasilnya dari usulan-usulan pembangunan yang telah diajukan tidak mendapat anggaran dari pemerintah Kabupaten untuk membiyai pelaksanaan pembangunannya.
2. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan di Desa Mayang Pongkai di karnakan oleh faktor-faktor sumber daya aparatur desa itu sendiri, belum optimalnya pengelolaan sumber dana desa, belum optimalnnya tingkat partisipasi masyrakat dan faktor relasi kerja sama antara tiap lembaga dalam menjalankan program pembangunan ini.

Rendahnya anggaran yang dimiliki juga menjadi alasan mengapa pembangunan di Desa Mayang Pongkai ini masih terkendala. Keadaan lainnya adalah sumber daya manusia yang belum mampu memperjuangkan usulan kegiatan pembangunan baik ditingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten, sehingga usulan-usulan yang telah diajukan didapatkan oleh desa-desa yang lainnya yang sumber daya manusianya mempunyai power akses untuk mendapatkan usukan yang diajukan. Rendahnya partisipasi masyarakat menjadi masalah yang serius dikarenakan partisipasi masyarakat menjadi motivasi terdepan dalam pelaksanaan pembangunan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis membeikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah harus bisa mencari jalan keluar untuk bisa kembali bersinergi bekerja sama dengan seluruh lembaga desa yang ada di Desa Mayang Pongkai ini, salah satunya dengan duduk bersama mencari jalan keluar dengan turut serta mengundang masyarakat.
2. Kepala Desa Mayang Pongkai harus bisa menjadi fasilitator untuk membawa masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi didalam pelaksanaan pembangunan, baik dari segi anggaran maupun pikiran untuk menyukseskan pembangunan di Desa Mayang Pongkai.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Adisasmita, Rahardjo .2006. *pembangunan pedesaan dan perkotaan*, Yogyakarta; Graha Ilmu.

Inu Kencana Syafei. 1998. *Ilmu Pemerintahan* , Mandar Maju, Bandung.

Iwan Nugroho dan Rochim Dahuri, 2004. *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial dan lingkungan*, Pustaka LP3ES; Jakarta.

Marbun, B,N.1983. *Proses Pembangunan Desa*: Erlangga.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Ndraha,Taliziduhu. 1987, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Bina Aksara*,Jakarta

Sudjarwo.2001 *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta :Penerbit Mandar Maju.

Sukandarrumidi. 2004. *Metodologi Penelitian Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Thoha,Miftah.2008. *Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media

Widjaja, H.A.W. 2002. *Pemerintahan desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Skripsi:

Ayu Novita.2013. *Relasi Kepala Desa dan BPD dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah*

Desa (RPJMDes) Plumbungan kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo.Skripsi :

Rintaka Hargita. 2015. *Partisipasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakatan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Karangwuni Kecamatan Rongkop*

Mahendra. 2016. *Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu 2009-2013*.

Jurnal :

Ali Abdul Wakhid. *Eksistensi konsep max weber dalam reformasi birokrasi di indonesia*.

Irfan Sangadji. 2010. *Birokrasi dan pelayanan publik*.

Jaitun. 2013. *Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung*.

Mohd. Saleh. 2015. *Upaya Peningkatan Kemampuan Aparat Desa Dalam Pembangunan Di Desa Morobudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik*.

Ranny Lendo. *Kinerja Aparat Desa dalam Pembangunan Di Desa Wuwuk Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*.

Peraturan Perundang- undangan :

Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

*Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa.*

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 84 Tahun 2015
Tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa.*

Sumber Lain :

[http//kelembagaan desa//.co.id](http://kelembagaan.desa//.co.id)

[http//undang-undang no 6//.co.id](http://undang-undang no 6//.co.id)

[http//teori pembangunan//.com](http://teori pembangunan//.com)